

KETIKA INSTRUMEN LEGITIMASI KEHILANGAN PATRON POLITIK: MENGUJI KERANGKA TRIPARTIT MICHAEL D. BARR TERHADAP ICMI

Roberto Arieza Martin Purba¹, Mohammad Taufiq Rahman², Hasan Mustapa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: robertopurba.jurnal@gmail.com

Abstrak

Studi Michael D. Barr (2009) tentang konfusianisme di Tiongkok dan Singapura mengembangkan kerangka tripartit untuk memahami bagaimana agama-ideologi dimanfaatkan dalam politik. Tiga level itu adalah elite politik sebagai alat legitimasi, intelektual publik sebagai medium artikulasi yang ambigu, dan masyarakat sebagai kognisi sosial yang bertahan lepas dari kendali negara. Kerangka ini, bagaimanapun, dibangun di atas satu asumsi tersembunyi, yaitu bahwa rezim otoriter yang mempatron instrumen agama-ideologi tersebut bersifat persisten. Artikel ini menguji batas asumsi tersebut melalui studi kasus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi cendekiawan Muslim yang didirikan tahun 1990 sebagai instrumen akomodasi politik Presiden Soeharto terhadap kelas menengah Muslim terdidik. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis historis-komparatif, artikel ini menunjukkan bahwa ICMI mengalami pola yang secara kualitatif berbeda dari konfusianisme di Singapura dan Tiongkok. Alih-alih terus direproduksi oleh elite yang bertahan, ICMI kehilangan fungsi legitimasinya segera setelah jatuhnya rezim patronnya pada 1998, bahkan ketika kader ICMI sendiri, yaitu B. J. Habibie, naik menjadi presiden. Temuan ini diajukan sebagai *boundary condition* (batas keberlakuan suatu teori dalam kondisi tertentu) baru bagi kerangka Barr bahwa instrumen legitimasi agama-negara bersifat "parasitis" terhadap stabilitas rezim yang mempatronnya, sehingga berperilaku berbeda dalam konteks otoritarianisme yang bertahan dibanding konteks transisi demokratis. Dua temuan pendukung memperkaya argumen ini. Pertama, residu yang ditinggalkan ICMI bersifat *material-institusional* (Bank Muamalat Indonesia, CIDES, Republika), bukan sekadar residu kognisi-sosial sebagaimana pada kasus konfusianisme. Kedua, legitimasi agama-negara di Indonesia dibangun melalui koalisi multi-institusi (ICMI, MUI, pengusaha Muslim), bukan instrumen tunggal yang dikendalikan satu figur elite sebagaimana di Singapura. Artikel ini menunjukkan bahwa kerangka tripartit Barr bekerja secara konsisten pada konteks otoritarianisme yang persisten, tetapi tidak otomatis dapat menjelaskan dinamika instrumen legitimasi agama pada konteks transisi demokrasi.

Kata Kunci: ICMI, Islam dan Negara, Legitimasi Politik, Konfusianisme, Civil Society, Michael D. Barr, Demokratisasi.

Abstract

Michael D. Barr's (2009) study of Confucianism in China and Singapore develops a tripartite framework for understanding how religion-ideology is mobilized in politics. The three levels are political elites as a tool of legitimation, public intellectuals as an ambiguous medium of articulation, and society as a form of social cognition that persists independently of state control. This framework, however, rests on an unstated assumption, namely that the authoritarian regime patronizing the religious-ideological instrument is persistent. This article tests the limits of that assumption through a case study of the Indonesian Association of Muslim

Intellectuals (ICMI), an organization founded in 1990 as an instrument of President Suharto's political accommodation toward the educated Muslim middle class. Using a literature-based and historical-comparative method, this article shows that ICMI underwent a qualitatively different pattern from Confucianism in Singapore and China. Rather than being continuously reproduced by a persisting elite, ICMI lost its legitimating function almost immediately after the fall of its patron regime in 1998, even when an ICMI cadre, B.J. Habibie himself, rose to the presidency. This finding is proposed as a new boundary condition for Barr's framework: religious-state legitimization instruments are "parasitic" on the stability of their patron regime, behaving differently under persistent authoritarianism than under democratic transition. Two supporting findings enrich this argument. First, the residue left behind by ICMI is material-institutional (Bank Muamalat Indonesia, CIDES, Republika) rather than merely a residue of social cognition as in the Confucianism case. Second, religious-state legitimization in Indonesia was built through a multi-institutional coalition (ICMI, the Indonesian Ulema Council/MUI, Muslim entrepreneurs) rather than a single instrument controlled by one elite figure as in Singapore. This article demonstrates that Barr's tripartite framework works consistently in the context of persistent authoritarianism, but cannot automatically explain the dynamics of religious legitimacy instruments in the context of democratic transition.

Keywords: *ICMI, Islam and the State, Political Legitimation, Confucianism, Civil Society, Michael D. Barr, Democratization.*

A. PENDAHULUAN

Sejak akhir 1980-an, masyarakat secara global menyaksikan, yang oleh banyak akademisi disebut "kembalinya" agama ke ranah politik dan hubungan internasional; dan merupakan tren yang berlawanan dengan prediksi teori sekularisasi klasik (Haynes, 2009). Resurgensi ini tidak hanya terjadi pada agama-agama besar dunia, tetapi juga pada sistem nilai dan ideologi yang berfungsi serupa agama dalam mengikat solidaritas sosial dan menyediakan basis legitimasi kekuasaan. Salah satu kajian paling berpengaruh dalam memetakan pola ini adalah karya Michael D. Barr (2009) tentang konfusianisme di Tiongkok dan Singapura, yang mengembangkan kerangka analitis tripartit. Konfusianisme dipahami secara simultan sebagai tiga hal: pertama, alat manipulasi oleh elite politik untuk kepentingan legitimasi kekuasaan; kedua, subjek kajian yang diperebutkan oleh intelektual publik yang posisinya ambigu antara independensi keilmuan dan kooptasi negara; dan ketiga, kognisi sosial yang hidup di akar rumput, bertahan lepas dari kendali negara maupun intelektual publik yang mempopulerkannya.

Kerangka Barr terbukti memiliki daya jelajah analitis yang kuat karena mampu menjelaskan mengapa konfusianisme, yang secara formal telah lama kehilangan status sebagai sistem pemerintahan, tetap dapat dimobilisasi ulang oleh rezim Jiang Zemin dan Hu Jintao di Tiongkok maupun Lee Kuan Yew di Singapura sebagai sumber legitimasi baru ketika basis legitimasi lama mereka melemah. Namun demikian, kerangka ini dibangun di atas satu kondisi struktural yang jarang dipersoalkan secara eksplisit. Ketiga level analisisnya, yaitu elite, intelektual publik, dan masyarakat, diamati dalam konteks rezim otoriter yang *bertahan* dalam jangka panjang. Pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana pola tripartit ini berperilaku ketika rezim yang mempatron instrumen agama-ideologi tersebut justru *runtuh*, digantikan oleh transisi demokratis.

Pertanyaan ini relevan diuji melalui kasus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi cendekiawan Muslim yang didirikan pada 7 Desember 1990 di Malang di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, dengan restu langsung Presiden Soeharto (Liddle, 1996; Hefner, 1993). Sebagaimana kasus konfusianisme dalam kerangka Barr, kelahiran ICMI dapat dibaca sebagai respons elite terhadap krisis legitimasi. Ia muncul tepat ketika dukungan militer

dan basis politik tradisional Soeharto mulai melemah menjelang akhir masa jabatannya (Hefner, 1993). Namun alur sejarah berikutnya menunjukkan pola yang berbeda secara mendasar dari kasus Tiongkok dan Singapura. Alih-alih terus direproduksi sebagai instrumen legitimasi, ICMI kehilangan fungsi politiknya secara drastis tidak lama setelah kejatuhan Soeharto pada 1998, sebuah keruntuhan fungsi yang terjadi *bahkan ketika* kader ICMI sendiri, B. J. Habibie, naik menggantikan Soeharto sebagai presiden.

Fenomena ini mengundang pertanyaan teoretis yang menjadi inti artikel ini. Jika instrumen legitimasi agama-negara kehilangan fungsinya bukan karena dikalahkan secara ideologis, melainkan karena rezim yang mempatroninya berganti melalui jalur demokratisasi, apakah ini menandakan adanya *boundary condition* atau batas keberlakuan suatu teori dalam kondisi tertentu yang belum terartikulasikan dalam kerangka Barr? Artikel ini berargumen bahwa jawabannya adalah ya. Legitimasi berbasis agama-ideologi bersifat "parasitis" terhadap stabilitas rezim politik yang mempatroninya, sehingga kerangka tripartit Barr perlu dilengkapi dengan satu sumbu analisis tambahan, yaitu stabilitas rezim patron (otoritarianisme persisten versus transisi demokratis), agar dapat menjelaskan variasi semacam ini secara memadai.

Untuk membangun argumen ini, artikel disusun dalam lima bagian setelah pendahuluan. Bagian kedua meninjau kerangka teoretis Barr secara lebih rinci dan meletakkannya dalam percakapan dengan literatur Islam-negara Indonesia yang telah ada. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian. Bagian keempat menyajikan hasil dan pembahasan, disusun mengikuti tiga level analisis Barr, yaitu *elite* (ICMI), *intelektual publik* (Nurcholish Madjid dan jaringan cendekiawan ICMI), dan *akar rumput* (residu institusional dan Islam sosial pascareformasi). Argumen utama *post-patron instrument* (alat legitimasi yang kehilangan fungsi setelah rezim pendukungnya runtuh) diposisikan sebagai inti pembahasan level elite, didukung oleh dua temuan tambahan mengenai sifat material residu institusional dan struktur koalisi multi-institusi dalam legitimasi Islam-negara Indonesia. Bagian kelima mendiskusikan implikasi teoretis temuan ini bagi revisi kerangka Barr, dan bagian keenam menutup artikel dengan ringkasan kontribusi, keterbatasan, dan agenda riset lanjutan.

Berangkat dari temuan tersebut, artikel ini berargumen bahwa instrumen legitimasi agama-negara bergantung pada stabilitas rezim patronnya. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menguji kerangka tripartit Barr, tetapi juga memperluasnya melalui penambahan *boundary condition* berupa stabilitas rezim politik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Tripartit Barr

Barr (2009) membangun analisisnya atas konfusianisme dengan menolak dua godaan interpretatif yang berlawanan: memperlakukan konfusianisme sebagai blok monolitik yang seragam di seluruh masyarakat Asia Timur, atau sebaliknya, menganggapnya sekadar konstruksi elite yang tidak memiliki daya hidup independen di luar kepentingan kekuasaan. Sebagai jalan tengah, Barr mengusulkan tiga lensa konseptual yang saling berkelindan namun tetap dapat dibedakan secara analitis.

Pertama, konfusianisme *sebagai alat manipulasi elite politik*. Barr menelusuri bagaimana kebangkitan kembali retorika konfusianis, baik di Singapura era Lee Kuan Yew pada dekade 1980-an maupun di Tiongkok era Jiang Zemin dan Hu Jintao sejak 1990-an, selalu muncul tepat pada momentum krisis legitimasi. Hilangnya basis legitimasi lama, seperti keanggotaan Sosialis Internasional bagi Singapura dan kredibilitas komunisme pascakrisis Lapangan Tiananmen bagi Tiongkok, memicu pencarian sumber legitimasi baru yang dapat dipasarkan sebagai "asli" dan berakar pada tradisi.

Kedua, konfusianisme *sebagai subjek kajian intelektual publik yang posisinya ambigu*. Barr menyoroti dilema intelektual publik seperti Tu Wei-ming, yang direkrut pemerintah Singapura untuk memberikan legitimasi akademik bagi kampanye konfusianisme resmi,

namun pada akhirnya justru berjarak dari proyek tersebut. Hasil akhirnya, yaitu buku ajar *confucian ethics* yang konservatif dan didaktik, jauh dari visi humanistik yang ia perjuangkan. Posisi intelektual publik di sini bersifat struktural: dibutuhkan legitimasinya, namun tidak diberi kendali atas hasil akhir.

Ketiga, *social confucianism*, yaitu pola kognisi sosial yang bertahan di tingkat akar rumput lepas dari kendali negara maupun intelektual publik, termanifestasi dalam pola relasi keluarga, hierarki sosial, dan etos kerja yang terus mereproduksi diri bahkan ketika konfusianisme formal sebagai sistem pemerintahan telah lama tiada. Barr menunjukkan bahwa level ini paling tahan terhadap intervensi negara karena sifatnya yang tersebar dan tidak terlembagakan secara formal.

Dalam mengoperasionalkan kerangka ini, Barr mengadopsi tiga elemen yang menurut Fox (2001) relevan untuk memahami peran agama dalam politik dan hubungan internasional. Tiga elemen itu adalah agama sebagai pengaruh langsung terhadap pembuat kebijakan; agama sebagai pengaruh tidak langsung melalui ekspektasi konstituen dan medium politik-kultural yang dihasilkannya; dan agama sebagai alat legitimasi baik bagi pemerintah maupun bagi pihak yang menentangnya. Ketiga elemen Fox ini berfungsi sebagai jembatan konseptual yang memungkinkan kerangka tripartit Barr, yang semula dirancang untuk konfusianisme, diterapkan pada agama dan ideologi lain secara lebih luas.

2. Posisi Kerangka Barr dalam Literatur Islam-Negara Indonesia

Literatur tentang ICMI dan relasi Islam-negara Indonesia telah berkembang sangat padat sejak awal 1990-an, namun belum pernah secara eksplisit diuji melalui kerangka tripartit semacam Barr. Hefner (1993, 2000) membaca ICMI melalui lensa *civil Islam*. Organisasi ini dipahami sebagai bagian dari kebangkitan kelas menengah Muslim terdidik yang berkontribusi pada demokratisasi, dengan penekanan bahwa baik demokrasi maupun masyarakat sipil membutuhkan negara yang beradab agar dapat berfungsi. Liddle (1996) memberikan penjelasan yang lebih murni politis: ICMI dipahami sebagai manuver kalkulatif Soeharto untuk merangkul segmen Muslim tanpa membuka ruang bagi mobilisasi politik Islam yang lebih radikal. Anwar (1995) merumuskan istilah "akomodasi Islam" untuk menggambarkan pergeseran sikap negara terhadap umat Islam menjelang akhir dekade 1980-an. Effendy (1998, 2003) menempatkan ICMI dalam narasi rekonsiliasi panjang antara Islam dan negara pascaketegangan dekade 1970-1980-an. Van Bruinessen (2013) mempertanyakan secara eksplisit apakah *civil Islam* Indonesia hanya mungkin berkembang di bawah patronase rezim otoriter, sebuah pertanyaan yang, jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya menyentuh inti persoalan yang dibahas Barr tentang konfusianisme, namun tidak pernah dipertemukan secara langsung dengan kerangka tersebut.

Kekosongan inilah yang coba diisi artikel ini. Bukan dengan menulis ulang sejarah ICMI, yang telah dipetakan secara memadai oleh para akademisi di atas, melainkan dengan menempatkan temuan-temuan empiris yang telah ada ke dalam kerangka komparatif lintas-agama dan lintas-kawasan yang ditawarkan Barr, sembari menguji asumsi tersembunyi dalam kerangka tersebut.

3. Operasionalisasi Tiga Level untuk Konteks Indonesia

Mengikuti struktur tripartit Barr, artikel ini mengoperasionalkan tiga level analisis sebagai berikut. *Level elite politik* dioperasionalkan melalui ICMI sebagai organisasi dan relasinya dengan Presiden Soeharto, termasuk pertanyaan tentang berlanjut-tidaknya fungsi legitimasi ICMI pascareformasi 1998. *Level intelektual publik* dioperasionalkan melalui posisi Nurcholish Madjid sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI sejak 1991, dibaca bersama kritik internal yang dilontarkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap kecenderungan sektarian sebagian faksi ICMI. Perdebatan ini terdokumentasi dalam kumpulan esai *ICMI: Antara Status*

Quo dan Demokratisasi (Ali-Fauzi, 1995) dan *Mereka Bicara Tentang ICMI* (Hakiem dkk., 1995). *Level akar rumput* dioperasionalkan melalui dua jenis data: pertama, residu institusional yang ditinggalkan ICMI (Bank Muamalat Indonesia, CIDES, Republika); kedua, data kuantitatif mengenai Islamisasi di tingkat lokal pascareformasi (peraturan daerah bernuansa syariah) dan data survei mengenai sikap keagamaan di masyarakat (intoleransi, pandangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara).

Operasionalisasi ini memungkinkan perbandingan langsung, bagian demi bagian, dengan temuan Barr atas konfusianisme, sekaligus membuka ruang bagi identifikasi titik-titik penyimpangan yang menjadi dasar argumen utama artikel ini.

C. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur (*library research*) dengan strategi analisis historis-komparatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat pertanyaan penelitian, yang menuntut penelusuran proses historis ICMI secara mendalam sekaligus perbandingan terstruktur dengan kasus konfusianisme yang telah dipetakan Barr (2009). Korpus data yang digunakan terdiri atas empat kategori. Pertama, sumber primer arkival berupa kumpulan esai yang diterbitkan langsung oleh para pelaku dan pengamat ICMI pada masa kontroversinya di pertengahan dekade 1990-an, yaitu *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi* (suntingan Nasrullah Ali-Fauzi, Mizan, 1995) dan *Mereka Bicara Tentang ICMI* (suntingan Lukman Hakiem dkk., Amanah Putra Nusantara, 1995), yang memuat pernyataan langsung tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Franz Magnis-Suseno, Adi Sasono, dan Akbar Tanjung. Kedua, literatur akademik berbahasa Inggris yang menjadi rujukan standar kajian ICMI, terutama Hefner (1993, 2000), Liddle (1996), dan Anwar (1995). Ketiga, data kuantitatif dari penelitian mengenai Islamisasi tingkat lokal pascareformasi (Buehler, 2016) dan survei sikap keagamaan dari lembaga independen (Wahid Foundation, SETARA Institute, PPIM UIN Jakarta). Keempat, dokumen institusional dan pemberitaan mengenai perkembangan ICMI pascareformasi hingga kepemimpinan terkini, termasuk arsip kelembagaan CIDES, Republika, dan Bank Muamalat Indonesia.

Teknik analisis dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah *process-tracing* historis, yaitu menelusuri rangkaian peristiwa ICMI sejak pendiriannya pada 1990 hingga kondisi terkini, dengan perhatian khusus pada titik balik 1998 sebagai momen yang diuji terhadap prediksi kerangka Barr. Tahap kedua adalah perbandingan terstruktur (*structured comparison*), yaitu memetakan temuan pada tiap level analisis ICMI secara berdampingan dengan temuan paralel Barr atas konfusianisme, untuk mengidentifikasi titik-titik kesesuaian maupun penyimpangan pola. Artikel ini menyadari keterbatasan inheren metode studi literatur. Data yang digunakan bersumber dari teks yang telah dipublikasikan, tanpa wawancara primer terhadap pelaku yang masih hidup. Keterbatasan ini, beserta implikasinya terhadap generalisasi temuan, didiskusikan lebih lanjut pada bagian penutup.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Level Elite: ICMI sebagai Instrumen Legitimasi (1990–1998)

Kelahiran ICMI tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik Soeharto menjelang dekade 1990-an. Organisasi ini bermula dari diskusi mahasiswa Universitas Brawijaya, namun dengan cepat "diadopsi" oleh elite kekuasaan. B.J. Habibie bersedia memimpin organisasi tersebut hanya setelah memperoleh restu langsung dari Soeharto, dan bahkan nama resmi organisasi, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, diusulkan langsung oleh Soeharto sendiri. Simbolisme kenegaraan yang menyertai kongres pendirian ICMI pada 7 Desember 1990 di Malang juga jauh dari kesan acara akademik biasa. Kongres dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden Sudharmono, dengan Soeharto tampil mengenakan pakaian tradisional santri sambil menabuh bedug saat membuka acara, sebuah tindakan

teatrical yang secara eksplisit memproyeksikan kedekatan personal sang presiden dengan identitas keislaman.

Motif di balik akomodasi ini sejalan persis dengan logika krisis legitimasi yang diidentifikasi Barr pada kasus konfusianisme. Sejumlah akademisi mencatat bahwa pendirian ICMI terjadi bersamaan dengan melemahnya dua pilar lama kekuasaan Soeharto, yaitu dukungan militer yang mulai retak serta basis dukungan elite tradisional yang tergerus seiring berjalannya waktu. Dalam kerangka ini, ICMI berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi politik Muslim ke dalam kebijakan publik tanpa harus membuka ruang bagi mobilisasi massa Islam yang lebih radikal. Strategi kooptasi ini berhasil meredam sebagian kritik dari komunitas Muslim terhadap rezim, mengingat keanggotaan ICMI mencakup baik tokoh Islam yang sebelumnya kritis di luar pemerintahan maupun menteri-menteri kabinet aktif. Kedalaman kooptasi ini tergambar dari komposisi kepengurusannya: hampir separuh kabinet, yaitu enam belas menteri, terpilih menduduki posisi kepemimpinan ICMI, sementara Presiden Soeharto sendiri ditetapkan sebagai *Pelindung* organisasi.

Paralelnya dengan kasus Tiongkok dan Singapura dalam kerangka Barr sangat presisi pada level ini. Sebagaimana Jiang Zemin dan Hu Jintao merangkul retorika konfusianis persis ketika legitimasi komunisme melemah pascakrisis Tiananmen, dan sebagaimana Lee Kuan Yew mempromosikan "nilai-nilai Asia" berbasis konfusianis setelah Singapura dipaksa keluar dari Sosialis Internasional, Soeharto merangkul ICMI tepat ketika pilar-pilar lama legitimasinya goyah. Pada titik historis 1990-1997, ICMI tampak akan mengikuti pola yang sama dengan konfusianisme di kedua negara tersebut, yaitu instrumen agama-ideologi yang terus direproduksi elite untuk mempertahankan kekuasaan.

2. Argumen Utama: "Post-Patron Instrument", Titik Pecah dari Model Barr

Argumen utama artikel ini sederhana: ketika instrumen legitimasi kehilangan patron, ia kehilangan fungsi politiknya meskipun dapat meninggalkan residu institusional yang bertahan. Kasus ICMI memperlihatkan pola tersebut secara jelas setelah runtuhnya rezim Orde Baru, ketika organisasi kehilangan fungsi legitimasinya tetapi institusi-institusi yang lahir dari jaringannya tetap hidup secara mandiri.

Di sinilah, bagaimanapun, lintasan historis ICMI mulai menyimpang secara tajam dari prediksi yang akan dihasilkan kerangka Barr apabila diterapkan secara langsung tanpa modifikasi. Krisis finansial Asia 1997–1998 memicu kejatuhan Soeharto pada Mei 1998. Namun yang terjadi pada ICMI setelahnya bukanlah reproduksi berkelanjutan sebagaimana nasib konfusianisme di Tiongkok dan Singapura, melainkan keruntuhan fungsi politik yang cepat dan jelas. Masa kejayaan ICMI berakhir tidak lama setelah Soeharto lengser. Perlakuan pemerintah terhadap organisasi ini berubah signifikan, meskipun B.J. Habibie, ketua ICMI sejak awal pendiriannya, justru naik menggantikan Soeharto sebagai presiden. Cendekiawan Muslim yang tergabung di ICMI tetap menunjukkan semangat berorganisasi, namun suara mereka tidak lagi menggema dalam percaturan politik nasional. Bahkan Muktamar IV ICMI di Makassar tidak menghasilkan capaian signifikan yang dirasakan langsung oleh umat.

Fakta bahwa keruntuhan fungsi ini terjadi *bahkan ketika* kader ICMI sendiri memegang kekuasaan tertinggi negara adalah detail krusial yang membedakan kasus ini secara kualitatif dari kasus-kasus dalam kerangka Barr. Jika logika "elite yang terus mereproduksi instrumen agama-ideologi demi legitimasi" berlaku linear, semestinya pemerintahan Habibie, yang dipimpin langsung oleh tokoh yang membesarkan ICMI, menjadi momentum penguatan, bukan peredupan, peran organisasi tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya. Penilaian akademik retrospektif menyimpulkan bahwa peran ICMI era Orde Baru lebih banyak bergerak di sektor yang tidak mengganggu stabilitas politik rezim, dan organisasi ini dinilai turut melegitimasi kekuasaan Orde Baru dengan melibatkan tokoh-tokoh Muslim yang sejalan dengan

pemerintah. Fungsi semacam ini otomatis kehilangan relevansinya begitu rezim yang dilegitimasinya tidak lagi ada dalam bentuk yang sama.

Interpretasi yang diajukan artikel ini adalah bahwa ICMI tidak gagal karena dikalahkan secara ideologis oleh narasi tandingan, sebagaimana konfusianisme di Tiongkok tidak pernah benar-benar "dikalahkan" oleh ideologi pesaing meski sempat direpresi era Mao. ICMI kehilangan fungsi karena sumber otoritas yang memungkinkannya berfungsi sebagai instrumen legitimasi, yaitu rezim otoriter tunggal yang membutuhkan pengesahan religius atas kekuasaannya, telah lenyap, digantikan oleh sistem politik kompetitif-elektoral di mana legitimasi tidak lagi bisa dimonopoli oleh satu organisasi yang dipatron satu rezim. Pasca-1998, partai-partai politik berbasis massa Islam, seperti PKB, PAN, PPP, dan PKS, muncul untuk bersaing memperebutkan suara umat Islam secara langsung melalui pemilu, sebuah kanal partisipasi politik yang jauh lebih kompetitif dan tidak lagi membutuhkan perantara organisasi seperti ICMI yang berkarakter korporatis-elitis ala Orde Baru.

Temuan ini mengarah pada proposisi teoretis utama artikel ini, yakni bahwa instrumen legitimasi berbasis agama-ideologi bersifat "parasitis" terhadap stabilitas rezim politik yang mempatroninya. Pada konteks otoritarianisme yang bertahan, seperti Tiongkok dan Singapura, instrumen tersebut terus direproduksi karena inangnya, yaitu rezim tunggal yang butuh legitimasi berkelanjutan, tetap ada dan tetap membutuhkannya. Pada konteks transisi demokratis, yaitu Indonesia pasca-1998, instrumen tersebut kehilangan fungsi spesifiknya karena inangnya berubah bentuk. Kebutuhan akan legitimasi religius terpusat digantikan oleh kompetisi elektoral plural yang mendistribusikan kanal artikulasi politik Islam ke banyak aktor sekaligus, bukan satu organisasi korporatis tunggal. Dengan kata lain, kerangka Barr secara implisit hanya valid pada satu sisi spektrum stabilitas rezim. Kasus ICMI menunjukkan sisi spektrum yang berlawanan, yang belum terartikulasikan dalam model aslinya.

3. Level Intelektual Publik: Dilema Nurcholish Madjid dan Pembelahan Internal

Sejak 1991, Nurcholish Madjid (Cak Nur) menduduki posisi Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI, sebuah jabatan struktural yang menempatkannya bukan sekadar pengamat dari luar, melainkan bagian resmi dari organisasi yang menjadi instrumen legitimasi rezim. Posisi ini menarik untuk dibaca berdampingan dengan rekam jejak pemikiran Cak Nur sendiri, yang dua dekade sebelumnya, pada 1970, telah melontarkan slogan "Islam Yes, Partai Islam No" di Taman Ismail Marzuki, sebuah gagasan yang secara eksplisit memisahkan keislaman substantif dari kelembagaan politik formal. Ketegangan antara prinsip pemikiran lama ini dan keterlibatannya dalam organisasi yang justru lahir dari kalkulasi kekuasaan negara menjadi salah satu titik analisis paling kaya pada level intelektual publik.

Ketegangan tersebut tidak hanya bersifat personal pada diri Cak Nur, tetapi mengkristal menjadi perpecahan terbuka di kalangan cendekiawan Muslim sendiri, sebuah pola yang berbeda dari dilema Tu Wei-ming di Singapura, yang lebih merupakan jarak antara satu intelektual publik dengan negara. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menolak bergabung dengan ICMI, secara eksplisit membedakan dua kubu di dalam tubuh ICMI. Kubu pertama adalah Habibie, Emil Salim, dan Nurcholish Madjid sendiri, yang ia nilai cenderung pada pendekatan kultural ("Islamisasi manusia-manusianya"). Kubu kedua adalah Imaduddin Abdulrahim, Fuad Amsyari, dan sejenisnya, yang menurutnya menghendaki birokrasi pemerintah disesuaikan dengan ajaran Islam secara lebih eksklusif dan diskriminatif. Gus Dur sendiri mengakui kesulitan menentukan arah pasti ICMI karena organisasi tersebut tidak pernah menuntaskan ambivalensi internalnya, dan menyebutnya sebagai "gerakan berwajah banyak". Sejumlah pembacaan akademik membaca penolakan Gus Dur ini sebagai respons reaktif terhadap dominasi politik kalangan modernis yang berseberangan dengannya, menunjukkan bahwa pembelahan di level intelektual publik ini juga tidak lepas dari kalkulasi aliansi politik jangka panjang antartokoh.

Perdebatan ini terdokumentasi secara luas dalam dua kumpulan esai yang diterbitkan langsung oleh para pelakunya pada 1995. *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi* memuat esai Gus Dur berjudul "Intelektual di Tengah Eksklusivisme", esai Franz Magnis-Suseno "Kekhawatiran Itu Bisa Dimengerti" yang menyuarakan kegelisahan dari sudut pandang rohaniwan lintas-agama, serta tanggapan Saiful Mujani terhadap tesis kelas-menengah-Muslim Hefner dan Nakamura mengenai kelahiran ICMI. Sementara itu, *Mereka Bicara Tentang ICMI* memuat pernyataan tokoh-tokoh di luar lingkaran ICMI sendiri, termasuk kritik Megawati Soekarnoputri yang menyatakan ICMI yang eksklusif akan mengurangi peran politik umat secara keseluruhan, serta pengakuan Akbar Tanjung dari kalangan Golkar yang mewanti-wanti ICMI agar menghindari kesan negatif sektarian.

Pembelahan di level intelektual publik ini relevan bagi argumen utama artikel ini. Ia menunjukkan bahwa instrumen legitimasi agama-negara, bahkan pada masa kejayaannya, tidak pernah benar-benar monolitik di level artikulasi intelektual, sebuah kerapuhan internal yang turut menjelaskan mengapa organisasi ini tidak memiliki fondasi ideologis yang cukup kokoh untuk bertahan melewati pergantian rezim patronnya.

4. Level Akar Rumput: Residu yang Bertahan Setelah Instrumen Ditinggalkan

Meskipun ICMI sebagai organisasi politik kehilangan fungsi legitimasinya pascareformasi, sejumlah institusi yang lahir dari jaringannya justru tetap bertahan, dan inilah yang menjadi temuan pendukung kedua artikel ini. ICMI turut mendirikan setidaknya tiga institusi konkret yang melampaui umur politik organisasi induknya. Pertama, CIDES (*Center for Information and Development Studies*), sebuah lembaga pemikir (*think tank*) yang kini berstatus yayasan otonom dalam struktur ICMI. Kedua, Harian Umum Republika, didirikan 1993 di bawah bendera PT Abdi Bangsa sebagai corong informasi umat Islam, yang kepemimpinan editorialnya melibatkan tokoh-tokoh seperti Amin Rais dan Dawam Rahardjo, namun sahamnya kemudian beralih mayoritas ke kelompok Mahaka Media setelah tahun 2000. Ketiga, Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama Indonesia yang resmi berdiri 1 November 1991 dengan ICMI sebagai salah satu dari dua belas pemegang saham pendiri.

Pola residu ini secara kualitatif berbeda dari *social confucianism* dalam kerangka Barr. Pada kasus konfusianisme, residu yang bertahan bersifat kognisi-sosial dan tidak terlembagakan secara formal, berupa pola relasi keluarga, hierarki sosial, dan etos kerja yang terus mereproduksi diri tanpa wadah organisasi yang jelas. Pada kasus ICMI, residu yang bertahan justru bersifat *material-institusional*, yaitu badan hukum, aset ekonomi, dan struktur kepemilikan yang independen secara finansial dari nasib politik organisasi induknya. Perpindahan kepemilikan saham mayoritas Republika ke Mahaka Media adalah bukti paling jelas dari pola ini. Institusi tersebut bukan hanya bertahan, tetapi bahkan lepas sepenuhnya dari kendali ICMI, sesuatu yang mustahil terjadi pada residu kognitif semacam *social confucianism* yang oleh definisinya tidak dapat "dijual" atau "dipindahtangankan".

Di luar residu institusional ICMI secara langsung, data mengenai dinamika Islam di tingkat akar rumput pascareformasi turut memperkaya gambaran level ketiga ini. Penelitian Michael Buehler mencatat setidaknya 443 peraturan daerah bernuansa syariah diadopsi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia antara 1998 dan 2013, sementara liputan investigatif mencatat bahwa dari 63 kepala daerah yang menerbitkan perda bernuansa syariah antara 1999–2009, hanya satu yang berasal dari partai Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa dorongan Islamisasi lokal tidak murni proyek partai politik Islam, melainkan fenomena yang lebih luas dan bersifat *bottom-up*. Data survei turut mengindikasikan kedalaman fenomena ini. Survei Wahid Foundation menemukan 57% responden Muslim mengaku memiliki kelompok yang tidak disukai, dengan mayoritas dari kelompok tersebut bersikap intoleran terhadapnya. Survei SETARA Institute bersama INFID terhadap pelajar SMA di lima kota (Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta, dan Padang) mencatat kenaikan proporsi pelajar

"intoleran aktif" dari 2,4% pada 2016 menjadi 5% pada 2023, dengan 83,3% di antaranya menilai Pancasila bukan ideologi negara yang permanen. Survei nasional PPIM UIN Jakarta tahun 2018 terhadap 2.237 guru dari jenjang TK hingga SMA di 34 provinsi menemukan 50,87% guru memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain.

Temuan-temuan ini sejalan dengan pertanyaan yang diajukan van Bruinessen mengenai apakah *civil Islam* Indonesia hanya dapat berkembang di bawah patronase otoriter. Namun data di atas justru menunjukkan arah sebaliknya dari yang dikhawatirkan. Setelah patronase otoriter ICMI berakhir, dinamika keagamaan di akar rumput tidak meredup, melainkan terus bergerak secara independen, bahkan ke arah yang lebih konservatif di sejumlah indikator. Temuan ini memperkuat argumen utama artikel ini dari sisi yang berbeda. Yang bersifat "parasitis" terhadap stabilitas rezim hanyalah instrumen legitimasi elite, yaitu ICMI sebagai organisasi politik, bukan dinamika keagamaan masyarakat itu sendiri, yang justru menunjukkan vitalitas independennya sendiri lepas dari nasib patronnya.

5. Sub-Argumen Tambahan: Koalisi Multi-Institusi versus Monolit Tunggal

Temuan pendukung ketiga artikel ini muncul dari pencermatan lebih dekat terhadap kasus Bank Muamalat Indonesia. Berbeda dari narasi populer yang menempatkan ICMI sebagai pendiri tunggal bank tersebut, penelusuran kronologis menunjukkan bahwa gagasan awal justru tercetus dalam lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan" pada Agustus 1990, empat bulan *sebelum* ICMI bahkan resmi berdiri. Hasan Basri selaku Ketua Umum MUI membawa gagasan ini ke Musyawarah Nasional MUI pada akhir Agustus 1991, sebelum akhirnya disetujui Presiden Soeharto setelah dilobi melalui B.J. Habibie. Bank ini akhirnya berdiri dengan dua belas pemegang saham yang mencakup MUI, ICMI, dan sejumlah pengusaha Muslim.

Kronologi ini mengungkap struktur legitimasi agama-negara Indonesia yang berbeda dari model Barr. Alih-alih instrumen tunggal yang dikendalikan satu figur elite, sebagaimana konfusianisme di Singapura yang nyaris seluruhnya merupakan proyek personal Lee Kuan Yew, legitimasi Islam-negara Indonesia dibangun melalui *koalisi multi-institusi*. MUI berperan sebagai otoritas keagamaan formal, ICMI sebagai representasi kelas menengah Muslim terdidik, pengusaha Muslim sebagai penyandang modal, dan Habibie sebagai jembatan politik personal ke Soeharto. Struktur koalisi ini mencerminkan ekosistem organisasi keagamaan Indonesia yang jauh lebih plural dibanding Singapura atau Tiongkok, di mana otoritas keagamaan-budaya relatif lebih terpusat di tangan negara atau satu figur pemimpin.

Implikasi dari temuan ini bagi kerangka Barr bersifat melengkapi, bukan menggantikan, argumen utama tentang *post-patron instrument*. Struktur koalisi multi-institusi ini turut menjelaskan mengapa residu institusional ICMI, terutama Bank Muamalat, dapat bertahan independen dari nasib politik ICMI, karena sejak awal institusi tersebut tidak pernah sepenuhnya dimiliki atau dikendalikan oleh ICMI semata, melainkan oleh koalisi pemangku kepentingan yang lebih luas dan tidak seluruhnya bergantung pada vitalitas politik ICMI sebagai organisasi.

6. Merevisi Kerangka Barr

Sebelum menguraikan revisi yang diajukan, perlu ditegaskan dasar metodologis mengapa temuan pada Bagian 4 layak diklaim sebagai kontribusi teoretis, bukan sekadar anomali kasus tunggal. Whetten (1989) menekankan bahwa identifikasi *bounding conditions*, yaitu kondisi "siapa", "di mana", dan "kapan" yang membatasi berlakunya suatu model, baru menjadi kontribusi teoretis yang sah apabila disertai penjelasan baru mengenai mengapa teori sebelumnya terbatas atau tidak memadai dalam menjelaskan kondisi tersebut, bukan sekadar menunjukkan bahwa teori tersebut gagal diterapkan pada kasus tertentu. Dalam tradisi sosiologi teori formal, Walker dan Cohen (1985) menyebut kondisi pembatas semacam ini

sebagai *scope condition*, yaitu pernyataan eksplisit mengenai jangkauan keberlakuan sebuah teori yang menentukan kapan proposisinya dapat diharapkan benar.

Mengacu pada kedua kerangka ini, klaim artikel ini bukan sekadar menunjukkan bahwa kerangka Barr "gagal" diterapkan pada kasus ICMI, melainkan mengusulkan penjelasan baru mengenai *mengapa* ia gagal: instrumen legitimasi agama-ideologi bersifat parasitis terhadap stabilitas rezim patronnya (Bagian 4.2), sehingga jangkauan keberlakuan kerangka Barr secara implisit terbatas pada kondisi otoritarianisme yang persisten. Dengan demikian, sumbu stabilitas rezim patron yang diusulkan berikut ini berfungsi sebagai *scope condition* eksplisit bagi kerangka tripartit Barr, sebuah elemen yang menurut Whetten (1989) membedakan kontribusi teoretis yang sah dari sekadar laporan kasus yang menyimpang.

Kasus ICMI tidak membantah kerangka Barr, tetapi memperlihatkan kondisi empiris yang belum dicakup oleh model tersebut. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan perluasan kerangka Barr dengan menambahkan dimensi stabilitas rezim patron sebagai variabel yang menentukan keberlangsungan instrumen legitimasi agama-negara.

Temuan-temuan pada Bagian 4 mengarah pada satu kesimpulan sintetis. Kerangka tripartit Barr, yang terdiri atas elite, intelektual publik, dan akar rumput, tetap valid sebagai peta level analisis, namun memerlukan satu sumbu tambahan agar dapat menjelaskan variasi lintas-kasus secara memadai, yaitu *stabilitas rezim politik yang mempatroni instrumen agama-ideologi tersebut*. Kerangka asli Barr, yang dibangun dari kasus Tiongkok dan Singapura, secara implisit hanya mengamati satu titik pada spektrum ini, yaitu otoritarianisme yang bertahan dalam jangka panjang. Kasus ICMI menunjukkan titik berlawanan pada spektrum yang sama, yaitu otoritarianisme yang berakhir melalui transisi demokratis.

Model revisi yang diajukan artikel ini dapat digambarkan sebagai matriks dua sumbu. Sumbu pertama adalah level aktor sebagaimana kerangka asli Barr, yaitu elite, intelektual publik, dan akar rumput. Sumbu kedua adalah stabilitas rezim patron, terbentang dari "otoritarianisme persisten" hingga "transisi demokratis". Pada kuadran otoritarianisme persisten, perilaku instrumen agama-ideologi mengikuti pola yang dipetakan Barr. Elite terus mereproduksi instrumen tersebut sebagai legitimasi berkelanjutan, sebagaimana konfusianisme di Tiongkok dan Singapura. Intelektual publik tetap berada dalam posisi ambigu yang terus-menerus direkrut ulang oleh negara, sebagaimana Tu Wei-ming. Residu di akar rumput bersifat kognisi-sosial yang relatif stabil. Pada kuadran transisi demokratis, yang direpresentasikan kasus ICMI, pola berbeda secara kualitatif. Elite kehilangan kebutuhan akan instrumen tersebut begitu kompetisi elektoral menggantikan kebutuhan legitimasi tunggal terpusat (Bagian 4.2). Residu yang ditinggalkan justru bersifat *material-institusional* yang dapat hidup independen secara ekonomi dari organisasi induknya (Bagian 4.4). Struktur koalisi yang membangun instrumen tersebut sejak awal cenderung lebih plural dan multi-institusi, bukan monolitik di bawah kendali satu figur (Bagian 4.5).

Tabel 1. Perbandingan Perilaku Instrumen Agama-Ideologi pada Dua Kondisi Stabilitas Rezim Patron

Level Analisis (Barr)	Otoritarianisme Persisten (Confucianism, Tiongkok/Singapura)	Transisi Demokratis (ICMI, Indonesia)
Elite politik	Instrumen terus direproduksi sebagai legitimasi berkelanjutan oleh rezim yang sama	Instrumen kehilangan fungsi begitu rezim patron tidak lagi memonopoli kekuasaan (Bagian 4.2)
Intelektual publik	Terus-menerus direkrut ulang oleh negara meski berjarak secara personal (Tu Wei-ming)	Terbelah secara internal sejak awal, tanpa satu pusat kekuasaan yang perlu dilayani bersama (Bagian 4.3)

Akar rumput	Residu bersifat kognisi-sosial, relatif stabil, tidak terlembagakan	Residu bersifat material-institusional, dapat hidup independen secara ekonomi dan lepas kendali (Bagian 4.4)
Struktur koalisi pembentuk instrumen	Monolitik, dikendalikan satu figur elite	Plural, dibangun lewat koalisi multi-institusi (Bagian 4.5)

Revisi ini memiliki implikasi metodologis bagi studi perbandingan agama dan politik secara lebih luas. Kerangka analisis yang dibangun dari kasus-kasus otoritarianisme yang bertahan, sebagaimana banyak studi religion-and-politics yang berfokus pada Asia Timur, Timur Tengah, atau negara-negara petro-otoriter, berisiko menghasilkan generalisasi yang tidak berlaku pada konteks demokrasi yang baru lahir atau sedang bertransisi. Studi-studi mendatang yang menerapkan kerangka semacam Barr pada kasus lain berpotensi menjadi agenda riset lanjutan untuk menguji generalisasi proposisi *post-patron instrument* yang diajukan artikel ini di luar konteks Islam-negara Indonesia. Kasus-kasus yang relevan diuji misalnya peran lembaga keagamaan dalam legitimasi rezim di negara-negara yang mengalami proses demokratisasi setelah periode otoritarianisme religius, seperti sejumlah negara pascakomunis di Eropa Timur atau negara-negara Amerika Latin pascakediktatoran.

Penting dicatat bahwa revisi ini tidak menafikan nilai eksplanatif kerangka asli Barr. Sebaliknya, ia memperkuat kerangka tersebut dengan memperluas cakupan aplikabilitasnya. Konfusianisme di Tiongkok dan Singapura tetap menjadi kasus paradigmatis untuk memahami bagaimana agama-ideologi berfungsi di bawah otoritarianisme yang bertahan. ICMI di Indonesia melengkapi peta tersebut dengan menunjukkan bagaimana instrumen serupa berperilaku ketika kondisi struktural yang menopangnya berubah secara fundamental.

E. KESIMPULAN

Artikel ini menguji kerangka tripartit Michael D. Barr mengenai konfusianisme, yaitu elite, intelektual publik, dan akar rumput, melalui studi kasus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam relasi Islam-negara Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa ICMI, meski lahir dari logika krisis legitimasi yang sangat mirip dengan kasus konfusianisme di Tiongkok dan Singapura, mengalami lintasan historis yang secara kualitatif berbeda. Alih-alih terus direproduksi oleh elite yang bertahan, ICMI kehilangan fungsi legitimasinya segera setelah jatuhnya rezim patronnya pada 1998, bahkan ketika kadernya sendiri naik menjadi presiden. Temuan ini diajukan sebagai *boundary condition* baru bagi kerangka Barr bahwa instrumen legitimasi agama-negara bersifat "parasitis" terhadap stabilitas rezim politik yang mempatroninya.

Tiga kontribusi utama dapat dirumuskan dari artikel ini. Pertama, kontribusi teoretis berupa proposisi *post-patron instrument* sebagai pelengkap kerangka tripartit Barr, yang memperluas aplikabilitasnya dari konteks otoritarianisme persisten ke konteks transisi demokratis. Kedua, temuan empiris bahwa residu institusional ICMI (CIDES, Republika, Bank Muamalat Indonesia) bersifat material dan dapat hidup independen secara ekonomi dari organisasi induknya, berbeda dari residu kognisi-sosial pada kasus konfusianisme. Ketiga, temuan empiris bahwa legitimasi Islam-negara Indonesia dibangun melalui koalisi multi-institusi (ICMI, MUI, pengusaha Muslim, dijembatani Habibie ke Soeharto), bukan instrumen tunggal di bawah kendali satu figur elite sebagaimana pada kasus Singapura.

Artikel ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, metode studi literatur yang digunakan bergantung sepenuhnya pada sumber yang telah dipublikasikan, tanpa wawancara primer terhadap pelaku sejarah ICMI yang masih hidup. Keterbatasan ini berpotensi melewatkan nuansa motif personal yang tidak terdokumentasikan secara tertulis. Kedua, perbandingan dengan kasus konfusianisme Barr bersifat perbandingan

dua kasus (*two-case comparison*) yang, meski memadai untuk mengidentifikasi *boundary condition* awal, belum cukup untuk menggeneralisasi proposisi *post-patron instrument* secara luas tanpa pengujian pada kasus-kasus tambahan di luar Asia Timur dan Asia Tenggara.

Untuk riset lanjutan, dua arah dapat diusulkan. Pertama, pengujian proposisi *post-patron instrument* pada kasus-kasus demokratisasi lain yang melibatkan instrumen legitimasi berbasis agama, guna menguji generalisasinya di luar konteks Indonesia. Kedua, penelusuran dimensi digital ICMI kontemporer, yaitu bagaimana organisasi yang kehilangan fungsi legitimasi politik formalnya beradaptasi atau gagal beradaptasi dengan ruang publik digital. Dimensi ini berada di luar cakupan kerangka tripartit Barr yang dirumuskan sebelum era media sosial, namun relevan untuk memahami kelangsungan hidup organisasi semacam ICMI pada dekade-dekade mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali-Fauzi, N. (ed.). (1995). *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi*. Bandung: Mizan.
- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Barr, M. D. (2009). Confucianism, from above and below. Dalam J. Haynes (Ed.), *Routledge Handbook of Religion and Politics*. London and New York: Routledge.
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Fox, J. (2001). Religion as an overlooked element of International Relations. *International Studies Review*, 3(3), 53–73.
- Hakim, L., Linrung, T., & Rakasima, M. F. (ed.). (1995). *Mereka Bicara Tentang ICMI: Sorotan 5 Tahun Perjalanan ICMI*. Jakarta: Amanah Putra Nusantara.
- Haynes, J. (Ed.). (2009). *Routledge Handbook of Religion and Politics*. London and New York: Routledge.
- Hefner, R. W. (1993). Islam, state, and civil society: ICMI and the struggle for the Indonesian middle class. *Indonesia*, 56, 1–35. <https://doi.org/10.2307/3351197>
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Liddle, R. W. (1996). The Islamic turn in Indonesia: A political explanation. *Journal of Asian Studies*, 55(3), 613–634. <https://doi.org/10.2307/2646448>
- Madjid, N. (1987). *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Madjid, N. (2019). *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Nurcholish Madjid Society/Kompas.
- Magnis-Suseno, F. (1995). Kekhawatiran itu bisa dimengerti. Dalam N. Ali-Fauzi (Ed.), *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi*. Bandung: Mizan.
- Mujani, S. (1995). Kultur kelas menengah Muslim dan kelahiran ICMI: Tanggapan terhadap R.W. Hefner dan M. Nakamura. Dalam N. Ali-Fauzi (Ed.), *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi*. Bandung: Mizan.
- Nakamura, M. (1993). The emergence of an Islamizing middle class and the dialectics of political Islam in the New Order Indonesia: Prelude to the formation of the ICMI. Makalah dipresentasikan pada *Islam and the Social Construction of Identities: Comparative Perspectives on Southeast Asian Muslims*, University of Hawaii.
- Van Bruinessen, M. (Ed.). (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

- Walker, H. A., & Cohen, B. P. (1985). Scope statements: Imperatives for evaluating theory. *American Sociological Review*, 50, 288–301.
- Wahid, A. (1995). Intelektual di tengah eksklusivisme. Dalam N. Ali-Fauzi (Ed.), *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi*. Bandung: Mizan.
- Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490–495. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308371>
- ICMI. (2021). *Hasil Muktamar VII ICMI Bandung: Arif Satria terpilih sebagai Ketua Umum periode 2021–2026*. [Sumber pemberitaan media massa nasional, Desember 2021].
- SETARA Institute & INFID. (2023). *Laporan Survei Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jakarta: SETARA Institute.
- PPIM UIN Jakarta. (2018). *Sikap Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia* [Survei nasional]. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahid Foundation. (2018). *Tren Toleransi Sosial-Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia* [Survei nasional, dilaksanakan Oktober 2017]. Jakarta: Wahid Foundation.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2023). *Inventaris Arsip Andi Makmur Makka 1965–2009*. Jakarta: Direktorat Pengolahan, ANRI.